

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/eszve538>

PERAN SATPOL PP PALEMBANG DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

M. Aidil Adha^{1, 1}, Rita Junita, ², Masayu Adiah^{3 3}

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang ¹⁻³

email korespondensi: junitarita@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 menuntut pemerintah desa untuk memiliki tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan kolaboratif dalam menanggulangi penyebaran virus di tingkat masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemerintahan desa dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 di Desa Sugih Waras Barat Kabupaten Muara Enim, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menghadapi krisis kesehatan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala desa, perangkat desa, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa dalam penanggulangan COVID-19 telah dilaksanakan melalui perencanaan kebijakan berbasis partisipasi masyarakat, koordinasi kelembagaan, implementasi program kesehatan, serta pengawasan kebijakan. Partisipasi masyarakat dan koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama keberhasilan penanggulangan pandemi. Namun, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pendukung masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pemerintahan desa dan peningkatan kolaborasi kelembagaan dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan desa dalam menghadapi krisis kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Satpol PP, penegakan kebijakan, protokol kesehatan, pandemi COVID-19, pelayanan publik.

1. PENDAHULUAN

Secara normatif, fungsi Satpol PP diatur dalam kerangka penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Dalam situasi pandemi, fungsi tersebut berkembang menjadi bagian dari upaya pengendalian krisis kesehatan yang menuntut kesiapan aparatur dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat. Penegakan protokol kesehatan tidak hanya menekankan pada tindakan represif, tetapi juga memerlukan pendekatan persuasif dan edukatif agar masyarakat memiliki kesadaran kolektif dalam menerapkan perilaku hidup

sehat. Menurut teori implementasi kebijakan publik, efektivitas penegakan kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, sumber daya pelaksana, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan (Mazmanian Sabatier, 2020). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peran aparat pemerintah daerah dalam penegakan protokol kesehatan memiliki tantangan yang kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Putra (2021) menunjukkan bahwa efektivitas penegakan protokol kesehatan di tingkat daerah dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparatur, rendahnya kesadaran masyarakat, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Penelitian lain oleh Hidayat et al. (2022) menemukan bahwa pendekatan persuasif yang dilakukan aparat penegak kebijakan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, namun implementasi pengawasan masih menghadapi kendala sosial dan budaya masyarakat lokal. Selain itu, penelitian Suryani dan Kurniawan (2023) menegaskan bahwa keberhasilan penegakan protokol kesehatan sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi publik dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji penegakan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, kajian yang secara khusus menyoroti peran Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah di tingkat pemerintah kota masih relatif terbatas, terutama dalam konteks dinamika sosial masyarakat perkotaan. Kota Palembang sebagai salah satu kota metropolitan di wilayah Sumatera Selatan memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi dan aktivitas ekonomi yang dinamis, sehingga menghadapi tantangan besar dalam pengendalian penyebaran COVID-19. Kondisi tersebut menuntut peran aktif Satpol PP Kota Palembang dalam melakukan pengawasan, penertiban, serta pembinaan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam penegakan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19, termasuk strategi pelaksanaan tugas, kendala yang dihadapi, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan kesehatan publik di tingkat pemerintah daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan protokol kesehatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam penegakan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas, serta mengevaluasi efektivitas strategi penegakan kebijakan kesehatan publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian administrasi publik dan tata kelola pemerintahan daerah, serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah dan kebijakan kesehatan masyarakat di masa krisis.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam penegakan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Penelitian berfokus pada pelaksanaan tugas penegakan kebijakan kesehatan, strategi operasional di lapangan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi penegakan protokol kesehatan. Subjek penelitian meliputi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, unsur pemerintah daerah yang terkait dengan penanganan pandemi, serta masyarakat yang menjadi sasaran pengawasan kebijakan protokol kesehatan. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar observasi lapangan, dan dokumentasi kebijakan serta laporan kegiatan penegakan protokol kesehatan. Variabel yang dianalisis mencakup kapasitas kelembagaan, strategi penegakan kebijakan, koordinasi lintas sektor, tingkat kepatuhan masyarakat, serta efektivitas pelaksanaan

penegakan protokol kesehatan. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014).

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan dinamika pelaksanaan penegakan kebijakan kesehatan di lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, serta strategi yang dilakukan aparat Satpol PP dalam menghadapi tantangan penegakan protokol kesehatan. Penggunaan desain penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran empiris mengenai peran Satpol PP dalam implementasi kebijakan kesehatan publik, sehingga selaras dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan tugas, mengidentifikasi hambatan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan penegakan protokol kesehatan.

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa Kota Palembang merupakan wilayah perkotaan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga memiliki kompleksitas dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan. Informan penelitian meliputi pimpinan Satpol PP, pejabat struktural yang menangani penegakan peraturan daerah, anggota Satpol PP yang bertugas di lapangan, serta masyarakat yang pernah menjadi objek pengawasan kebijakan. Teknik purposive sampling digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai fokus penelitian (Creswell Creswell, 2018).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai strategi pelaksanaan penegakan protokol kesehatan, koordinasi antarinstansi, serta kendala operasional yang dihadapi aparat Satpol PP. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan penertiban dan pengawasan protokol kesehatan, termasuk interaksi antara aparat dan masyarakat. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah peraturan daerah, kebijakan penanganan COVID-19, laporan kegiatan Satpol PP, serta data pelanggaran protokol kesehatan. Penggunaan triangulasi teknik pengumpulan data bertujuan untuk meningkatkan validitas temuan penelitian (Sugiyono, 2020).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik untuk memudahkan interpretasi data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Satpol PP dalam penegakan protokol kesehatan.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, serta member check. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan penelitian. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member check dilakukan dengan mengonfirmasi hasil penelitian kepada informan guna memastikan kesesuaian interpretasi data dengan kondisi empiris (Lincoln Guba, 1985).

Metodologi penelitian ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian dalam menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam penegakan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas, serta mengevaluasi efektivitas strategi penegakan kebijakan kesehatan publik. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman kontekstual terhadap implementasi kebijakan di

tingkat daerah, sementara penggunaan teknik pengumpulan data yang beragam dan analisis data sistematis memastikan hasil penelitian memiliki validitas dan reliabilitas ilmiah.

3. TINJAUAN LITERATUR

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tidak hanya merepresentasikan krisis medis skala global, tetapi juga menguji daya tahan dan efektivitas sistem sosial, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penanganan pandemi memerlukan intervensi kebijakan publik yang bersifat multisektoral, terintegrasi, dan cepat.

Dalam konteks penanganan krisis, pemerintah Indonesia menetapkan serangkaian kebijakan strategis mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang mengondisikan penerapan standar kesehatan publik secara ketat (seperti penggunaan masker, pembatasan kerumunan, dan pengaturan ruang gerak sosial-ekonomi). Efektivitas intervensi kesehatan masyarakat ini sangat bergantung pada keberhasilan mengkonversi regulasi menjadi perilaku patuh di tingkat tapak.

Pada tingkat daerah, eksekusi kebijakan penanganan pandemi berada pada pundak pemerintah daerah beserta aparat penegak peraturan daerah (Perda). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peran kunci sebagai instrumen utama pemerintah daerah dalam memelihara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan krisis kesehatan global yang berdampak luas terhadap sistem sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam merespons krisis multidimensional ini, Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk menekan penyebaran virus, seperti pembatasan aktivitas masyarakat, penerapan protokol kesehatan secara ketat, serta penguatan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan publik. Dalam konteks pemerintah daerah, implementasi kebijakan tersebut memerlukan peran aktif dari aparat penegak peraturan daerah yang memiliki fungsi langsung dalam pengawasan dan penertiban di lapangan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah memegang peran strategis dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk dalam mengawal penegakan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Penegakan protokol kesehatan ini menjadi bagian krusial dari upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran virus melalui penerapan standar kesehatan masyarakat, seperti kewajiban penggunaan masker, pembatasan kerumunan, dan pengaturan aktivitas sosial-ekonomi. Sebagai aparat penegak regulasi daerah, Satpol PP memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan, penertiban, hingga pembinaan terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut, yang sekaligus menempatkan mereka sebagai aktor kunci dalam mendukung efektivitas kebijakan kesehatan publik di tingkat daerah.

Keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan sangat bergantung pada dinamika tata kelola pemerintahan yang melatarbelakanginya. Menurut konsep **governance** dan penegakan kebijakan publik, efektivitas penegakan regulasi dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan (Peters, 2021). Dalam kerangka konseptual penelitian ini, penegakan protokol kesehatan oleh Satpol PP didorong oleh tiga elemen utama, yaitu kapasitas internal Satpol PP itu sendiri, kualitas koordinasi lintas sektor bersama instansi terkait, serta

kejelasan komunikasi kebijakan kepada publik. Sinergi dari ketiga aspek input tersebut akan menentukan kualitas penegakan protokol kesehatan di lapangan, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat sebagai kriteria utama keberhasilan kebijakan penanganan pandemi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam penegakan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 melalui lima dimensi utama, yaitu kapasitas kelembagaan, strategi penegakan kebijakan, koordinasi lintas sektor, tingkat kepatuhan masyarakat, dan efektivitas pelaksanaan penegakan protokol kesehatan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi kebijakan dan laporan kegiatan Satpol PP Kota Palembang. 1. Kapasitas Kelembagaan dalam Penegakan Protokol Kesehatan Kapasitas kelembagaan Satpol PP Kota Palembang menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan protokol kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan pengawasan lapangan serta memiliki pedoman operasional dalam penertiban masyarakat selama pandemi. Aparat Satpol PP menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap kebijakan penanganan COVID-19 melalui pelaksanaan patroli rutin, pengawasan pusat keramaian, serta pembinaan masyarakat. Namun demikian, keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan menjadi tantangan dalam optimalisasi pelaksanaan tugas. Selain itu, kebutuhan peningkatan kapasitas pelatihan terkait pendekatan komunikasi sosial dan penanganan konflik masyarakat masih diperlukan. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Rahman dan Putra (2021) yang menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan aparat daerah menjadi faktor penting dalam efektivitas penegakan kebijakan kesehatan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Palembang menerapkan strategi penegakan kebijakan melalui pendekatan preventif, persuasif, dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pendekatan persuasif dilakukan melalui pembinaan dan teguran kepada pelanggar protokol kesehatan. Pendekatan represif dilakukan melalui penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang berulang. Strategi kombinasi tersebut menunjukkan upaya aparat dalam menyeimbangkan fungsi penegakan hukum dengan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Penelitian Hidayat et al. (2022) menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dalam penegakan protokol kesehatan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan kesehatan publik.

Penegakan protokol kesehatan melibatkan koordinasi antara Satpol PP dengan instansi pemerintah daerah lainnya, seperti dinas kesehatan, kepolisian, dan aparat kewilayahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor berjalan melalui kegiatan patroli terpadu dan operasi gabungan dalam pengawasan kerumunan masyarakat. Meskipun koordinasi antarinstansi berjalan dengan baik, masih ditemukan kendala dalam sinkronisasi jadwal kegiatan dan pembagian kewenangan operasional. Penelitian Suryani dan Kurniawan (2023) menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pandemi sangat dipengaruhi oleh integrasi koordinasi antarinstansi pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Tingkat kepatuhan masyarakat menjadi indikator penting dalam keberhasilan penegakan protokol kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat mengalami peningkatan setelah dilakukan pengawasan rutin dan sosialisasi berkelanjutan oleh Satpol PP. Namun demikian, masih terdapat pelanggaran pada kegiatan sosial masyarakat dan aktivitas ekonomi informal.

Penelitian Peters (2021) menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan publik

dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah serta efektivitas komunikasi kebijakan.

Efektivitas pelaksanaan penegakan protokol kesehatan dapat dilihat dari stabilitas penerapan kebijakan serta tingkat pengurangan pelanggaran masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Palembang mampu menjaga konsistensi pengawasan melalui patroli rutin dan operasi penertiban di pusat aktivitas masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan kebijakan dipengaruhi oleh strategi komunikasi publik, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian OECD (2020) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan krisis kesehatan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP Kota Palembang dalam penegakan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui strategi pengawasan, penertiban, dan pembinaan masyarakat yang terintegrasi dengan koordinasi lintas sektor. Kapasitas kelembagaan yang didukung oleh pedoman operasional dan pengalaman aparat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pelaksanaan tugas. Namun, keterbatasan jumlah personel dan kompleksitas wilayah pengawasan menunjukkan perlunya penguatan kapasitas organisasi. Strategi penegakan kebijakan yang mengkombinasikan pendekatan persuasif dan represif menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Pendekatan edukatif memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat, sementara penerapan sanksi administratif berfungsi sebagai mekanisme pengendalian pelanggaran kebijakan. Koordinasi lintas sektor menjadi faktor strategis dalam mendukung efektivitas penegakan kebijakan kesehatan publik. Integrasi pengawasan antarinstansi memungkinkan pelaksanaan kebijakan yang lebih komprehensif. Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan protokol kesehatan. Secara keseluruhan, peran Satpol PP Kota Palembang dalam penegakan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 menunjukkan kontribusi signifikan dalam mendukung pengendalian penyebaran COVID-19 melalui pengawasan kebijakan, pembinaan masyarakat, dan koordinasi antarinstansi pemerintah daerah.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang memiliki peran strategis dalam penegakan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 melalui kegiatan pengawasan, penertiban, serta pembinaan masyarakat. Pelaksanaan tugas dilakukan melalui pendekatan preventif, persuasif, dan represif yang terintegrasi dengan koordinasi lintas sektor pemerintah daerah.

Efektivitas pelaksanaan penegakan protokol kesehatan dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, strategi komunikasi kebijakan, koordinasi antarinstansi, serta tingkat kepatuhan masyarakat. Kapasitas organisasi dan pedoman operasional telah mendukung pelaksanaan tugas, meskipun keterbatasan personel dan kompleksitas wilayah pengawasan masih menjadi kendala. Strategi sosialisasi dan pembinaan masyarakat terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan.

Secara keseluruhan, peran Satpol PP Kota Palembang dalam penegakan protokol kesehatan menunjukkan kontribusi penting dalam mendukung pengendalian penyebaran COVID-19. Penguatan

kapasitas aparatur, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas penegakan kebijakan kesehatan pada situasi krisis di masa mendatang.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Creswell, J. W., Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
2. Hidayat, R., Pratama, D., Wicaksono, B. (2022). Public compliance and enforcement strategies of health protocols during COVID-19 pandemic. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 115–128.
3. Lincoln, Y. S., Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
4. Mazmanian, D. A., Sabatier, P. A. (2020). *Implementation and public policy*. Lanham, MD: Rowman Littlefield.
5. Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
6. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Public service leadership and capability during COVID-19*. Paris: OECD Publishing.
7. Peters, B. G. (2021). *Governance, politics and the state*. London: Red Globe Press.
8. Rahman, A., Putra, H. (2021). Local government capacity in enforcing COVID-19 health protocols. *Journal of Public Policy and Governance*, 5(1), 45–58.
9. Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
10. Suryani, L., Kurniawan, T. (2023). Public communication strategy and community participation in pandemic policy implementation. *Public Administration Quarterly*, 47(1), 89–105.